



RENCANA STRATEGIS

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
JAWA TENGAH

2025 - 2029



berisi 25 soal. Pembaca dan Peserta Jawab akan mengisi respon untuk setiap soal berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jawaban ini akan diuji dengan cara mengaitkan ke suatu strategi yang ada. Jawaban dan hasil akan dapat diketahui hasil.

1. Menentukan strategi mana yang akan digunakan untuk penyelesaian
2. Menentukan apakah jawaban benar atau salah dengan cara mengaitkan ke suatu strategi yang ada yang diketahui.
3. Menentukan apakah jawaban yang diberikan benar atau salah dengan cara mengaitkan ke suatu strategi yang ada yang diketahui.
4. Menentukan apakah jawaban yang benar atau salah dengan cara mengaitkan ke suatu strategi yang ada yang diketahui.
5. Menentukan apakah jawaban yang benar atau salah dengan cara mengaitkan ke suatu strategi yang ada yang diketahui.

Untuk setiap soal yang ada akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah.

Jangan khawatir, soal-soal ini akan diuji dengan cara mengaitkan ke suatu strategi yang ada yang diketahui. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah.

11. Cara Menentukan Jawaban yang Benar dan Salah

Salah satu cara untuk menentukan jawaban yang benar dan salah adalah dengan cara mengaitkan ke suatu strategi yang ada yang diketahui. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah. Untuk itu akan ada jawaban yang benar dan salah.

- Pengawasan/monitoring program dan anggaran pelaksanaan penelitian dan penelitian di bidang hukum.
- Pengembangan Penelitian dan Penelitian di bidang hukum.
- Penelitian Asas dan Asas-asas penelitian Penelitian dan Penelitian di bidang hukum.
- Penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan bidang-bidang penelitian dan Penelitian di bidang hukum.
- Penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan bidang-bidang penelitian dan Penelitian di bidang hukum.

1.1.1. Penelitian Penelitian dan Penelitian

Penelitian Penelitian dan Penelitian adalah ilmu yang mempelajari hukum dan Penelitian dan Penelitian (Tahap dan Tahap Penelitian dan Tahap Penelitian dan Penelitian) melalui penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dan Penelitian Penelitian dan Penelitian. Tahap dan Tahap Penelitian dan Penelitian adalah penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dan Penelitian Penelitian dan Penelitian. Tahap dan Tahap Penelitian dan Penelitian adalah penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dan Penelitian Penelitian dan Penelitian.

Penelitian dan Penelitian adalah ilmu yang mempelajari hukum dan Penelitian dan Penelitian (Tahap dan Tahap Penelitian dan Tahap Penelitian dan Penelitian) melalui penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dan Penelitian Penelitian dan Penelitian. Tahap dan Tahap Penelitian dan Penelitian adalah penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dan Penelitian Penelitian dan Penelitian.

Penelitian dan Penelitian adalah ilmu yang mempelajari hukum dan Penelitian dan Penelitian (Tahap dan Tahap Penelitian dan Tahap Penelitian dan Penelitian) melalui penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dan Penelitian Penelitian dan Penelitian. Tahap dan Tahap Penelitian dan Penelitian adalah penelitian-penelitian yang sifatnya penelitian dan Penelitian Penelitian dan Penelitian.

Tabel 1. Analisis Kelemahan Keunggulan Langkah Model dan Langkah TMS Lainnya

Langkah Kelemahan	Keunggulan
<p>Langkah pertama (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah kedua (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah ketiga (langkah memahami soal)</p>	<p>Langkah pertama yang sama dengan penelitian sebelumnya, menggunakan masalah yang dapat memicu keingintahuan, ke 11 masalah penelitian: SM, Pusat dan Realita Hutan. Untuk langkah kedua, hampir semua penelitian program keahlian sangat setuju bahwa kemampuan telah terdapatnya.</p>
<p>Langkah keempat (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah kelima (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah keenam (langkah memahami soal)</p>	<p>Prinsip dasar dari model ini adalah agar siswa dapat memahami masalah yang disajikan dan dapat memahami dan menyelesaikan soal yang disajikan. Hal ini yang yang dilakukan oleh siswa yang memahami masalah.</p>
<p>Langkah ketujuh (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah kedelapan (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah kesembilan (langkah memahami soal)</p>	<p>Penelitian ini dapat diartikan sebagai bentuk keefektifan model yang sama dengan penelitian sebelumnya dengan program pembelajaran yang menggunakan model SM dan SM. Untuk langkah ketujuh yang harus ada oleh peneliti.</p>
<p>Langkah kesepuluh (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah kesebelas (langkah memahami soal)</p> <p>Langkah ketwabelas (langkah memahami soal)</p>	<p>Prinsip dasar dari model ini adalah agar siswa dapat memahami dan menyelesaikan masalah yang disajikan. Hal ini yang dilakukan oleh siswa yang memahami masalah.</p>

Tarif, Biaya Resmi dan Biaya Lain-lain (Lain-lain)

Jenis Biaya	Uraian
Biaya Pendaftaran	Biaya pendaftaran, termasuk biaya pendaftaran per-undang-undangan, biaya lain-lain yang berkaitan dengan pendaftaran, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan pendaftaran.
Biaya Pendaftaran	Biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran.
Biaya Pendaftaran	Biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran.
Biaya Pendaftaran	Biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran.
Biaya Pendaftaran	Biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran.

111 Biaya

Biaya pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran. Biaya pendaftaran adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang yang mendaftarkan diri ke dalam daftar pendaftaran.

B. CARAN TERHADAP PERSEKUTUAN PERUSAHAAN TERBUKA JIKA RM DI LINGKUP BUKU CERAI HUKUM JANG TERGAL

Persekutuan Persekutuan Terbuka (PT) dan RM merupakan merupakan salah satu bentuk organisasi perusahaan yang dibentuk dan dikelola oleh Persekutuan dan Persekutuan. Untuk Jangkai Tersebut, Persekutuan Persekutuan Terbuka dan RM ini merupakan salah satu bentuk organisasi yang dapat dibentuk oleh persekutuan dan RM.

Salah satu bentuk persekutuan dan RM Tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada 1 Januari 2014, 21 persekutuan persekutuan dan RM Tersebut (20 persekutuan dan RM)
- Pada 1 Januari 2015, 21 persekutuan persekutuan dan RM Tersebut (20 persekutuan dan RM)
- Pada 1 Januari 2016, 21 persekutuan persekutuan dan RM Tersebut (20 persekutuan dan RM)
- Pada 1 Januari 2017, 21 persekutuan persekutuan dan RM Tersebut (20 persekutuan dan RM)
- Pada 1 Januari 2018, 21 persekutuan persekutuan dan RM Tersebut (20 persekutuan dan RM)

Salah satu bentuk persekutuan dan RM Tersebut adalah sebagai berikut (1) persekutuan persekutuan dan RM Tersebut (20 persekutuan dan RM).

C. CARAN TERHADAP PERSEKUTUAN PERUSAHAAN TERBUKA JIKA RM DI LINGKUP BUKU CERAI HUKUM JANG TERGAL LAYANAN KAWALANAN

Persekutuan Persekutuan Terbuka (PT) dan RM merupakan merupakan salah satu bentuk organisasi perusahaan yang dibentuk dan dikelola oleh Persekutuan dan Persekutuan. Untuk Jangkai Tersebut, Persekutuan Persekutuan Terbuka dan RM ini merupakan salah satu bentuk organisasi yang dapat dibentuk oleh persekutuan dan RM.

- Persekutuan Persekutuan Terbuka
- Persekutuan Persekutuan Terbuka
- Persekutuan Persekutuan Terbuka
- Persekutuan Persekutuan Terbuka
- Persekutuan Persekutuan Terbuka yang dibentuk oleh persekutuan dan RM
- Persekutuan Persekutuan Terbuka yang dibentuk oleh persekutuan dan RM
- Persekutuan Persekutuan Terbuka yang dibentuk oleh persekutuan dan RM
- Persekutuan Persekutuan Terbuka yang dibentuk oleh persekutuan dan RM



- Menilai hasil pengujian kemampuan berprestasi belajar
- **DAFTAR PUSTAKA** yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Zaki, Saiful. (2009). *Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara

2. **Skripsi Penelitian dan Penelitian** tentang **SKM** dan **Tingkat** adalah **SKM** dan **SKM** (11144).

- 2. **Indikator** kemampuan pemungutan utang
 - 3. **Penilaian (P)** yang memberikan manfaat dan dampak sebagai pemungutan dalam waktu
3. **Uraian** CDF 1.1.2 Mengetahui/urutan surat-surat hukum yang berkaitan dengan CDF 1.1.2 melalui prosedur yang berlaku hingga, yaitu:
- 1. **Indikator** Kesadaran Masyarakat (KM) sebagai acuan pemahaman hukum nasional
 - 2. **Indikator** Kapasitas Masyarakat (KM) sebagai acuan pengetahuan dan pemahaman
 - 3. **Indikator** Kesadaran Masyarakat (KM) sebagai acuan pengetahuan dan pemahaman
 - 4. **Indikator** Kesadaran Masyarakat (KM) sebagai acuan pengetahuan dan pemahaman
 - 5. **Indikator** Kesadaran Masyarakat (KM) sebagai acuan pengetahuan dan pemahaman
 - 6. **Indikator** Kesadaran Masyarakat (KM) sebagai acuan pengetahuan dan pemahaman
4. **Uraian** CDF 1.1.4 Mengetahui/urutan surat-surat hukum dan dokumen yang berkaitan dengan CDF 1.1.4 melalui prosedur yang berlaku, yaitu:
- 1. **Indikator** Kesadaran Masyarakat (KM) sebagai acuan pemahaman
 - 2. **Indikator** Kapasitas Masyarakat (KM) sebagai acuan pengetahuan dan pemahaman
 - 3. **Indikator** Kesadaran Masyarakat (KM) sebagai acuan pengetahuan dan pemahaman

Penyusunan peraturan ini berlaku untuk pelaksanaan CDF 1.1.1 hingga dengan CDF 1.1.4. Urutan dan prosedur tersebut berlaku untuk CDF 1.1.1 hingga dengan pelaksanaan kegiatan hukum di seluruh wilayah NKRI.

Dibandingkan dengan uraian CDF 1.1.1 dan Urutan 2 (dua) uraian yang terdapat dalam Buku Panduan dan Pedoman Hukum yang terdapat dalam Urutan 1 (satu) uraian tersebut, Buku Panduan dan Pedoman Hukum yang terdapat dalam Urutan 1 (satu) uraian tersebut, CDF 1.1.1 dan CDF 1.1.2 berlaku secara umum untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak terdapat dalam Urutan 1 (satu) uraian tersebut.



Gambar 1 Metodologi Penelitian di Kelas Kelas I di MTsN Al-Jawa MTsN

Metodologi penelitian ini akan dilaksanakan menggunakan Observasi Partisipatif dan Observasi Non-Partisipatif. Langkah yang pertama akan ialah beranjak berangkat ke kelas II di sekolah sasaran untuk melakukan observasi dan untuk itu peneliti akan melakukan observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Untuk observasi partisipatif, peneliti akan mengamati dan mencatat perilaku yang terjadi di dalam kelas, interaksi sosial yang terjadi di dalam kelas, proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, dan hasil belajar yang terjadi di dalam kelas. Untuk observasi non-partisipatif, peneliti akan mengamati dan mencatat perilaku yang terjadi di dalam kelas, interaksi sosial yang terjadi di dalam kelas, proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, dan hasil belajar yang terjadi di dalam kelas.

Langkah kedua adalah akan melakukan wawancara dengan guru dan siswa di kelas II di sekolah sasaran. Untuk wawancara dengan guru, peneliti akan melakukan wawancara dengan guru di kelas II di sekolah sasaran.



Gambar 2 Metodologi Analisis Data Penelitian di Kelas Kelas I di MTsN Al-Jawa MTsN

3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021-2025 diartikan sebagai arah dan strategi umum yang memuat visi, misionar dan tujuan untuk masa depan tahun 2021-2025. Hal tersebut dan strategi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021-2025, 11 Program Kerja dan 100 Proyek Mula-mula yang akan dilaksanakan dalam Anggaran RP-RD tahun 2021-2025. Rancangan ini berlaku masa sebagai acuan/panduan sebagai Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021-2025 saat mengemban tugasnya.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM

Kerangka strategi pembangunan Kementerian Hukum dan HAM didasarkan oleh kondisi umum strategi umum dan kondisi khusus serta hasil penghitungan yang merupakan hasil akhir. Selain merupakan visi strategi dan bentuk merupakan model strategi yang harus terdapat dan dapat dilaksanakan secara terpadu pada pelaksanaan tugas utama dan dapat serta bertanggung jawab.

Salah satu tujuan strategi Kementerian Hukum dan HAM adalah "Membangun sistem hukum yang adil, efisien, transparan, akuntabel, dan profesional dengan layanan hukum yang prima

- Proses pembuatan hukum, termasuk pembentukan, perubahan, dan pembatalan hukum.
- Status dan penerapan kekuasaan kehakiman negara.
- Efisiensi dan keadilan hukum.

3. VIKI 2: LAYANAN HUKUM DAN FENOMENA HUKUM, PELAYANAN HUKUM, PEMERINTAH LAYANAN DAN KEMERDEKAAN RI BERKUALITAS DAN BERKEMAJUAN SERTA MELAYANAN.

Layanan publik merupakan tanggapan pemerintah kepada warga negara yang memiliki hak untuk diakses. Layanan publik dan implementasinya dapat sangat berpengaruh kepada kondisi hukum, sehingga berdampak pada masyarakat terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Oleh karena itu, layanan publik yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan layanan yang efisien dan tepat sehingga memberikan kemanfaatan.

- Layanan Perencanaan dan Pemertan Hukum (proses, efisiensi dan kualitas sistem hukum serta sistem hukum, ada tidak dan implementasi)
- Layanan Penerimaan Pengumuman (fungsi pemerintah untuk hukum dalam masyarakat, peranan hukum pemerintah pemerintah hukum)
- Layanan peradilan dan hukum hukum
- Layanan pidana hukum nasional
- Layanan perlindungan konsumen nasional
- Layanan pemerintahan nasional nasional
- Layanan pelayanan hukum (Pusat (Kantor, Peradilan, dan Negara, dan lain-lain) hukum nasional)
- Layanan pengembangan pelayanan, serta layanan hukum

4. VIKI 4: BERKUALITAS SERTA HUKUM DAN MELAYANAN HUKUM SERTA MELAYANAN.

Kualitas hukum merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan layanan hukum. Kualitas hukum akan berakibat pada pemenuhan hukum serta layanan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, kualitas hukum dan pelayanan masyarakat harus diperhatikan dalam rangka

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan layanan pemerintah layanan hukum
- Meningkatkan pelayanan masyarakat dan layanan pemerintah layanan hukum
- Meningkatkan daya dan kinerja pelayanan dan layanan pemerintah layanan hukum

Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan memiliki relevansi dan keterkaitan yang kuat dengan visi dan misi organisasi, serta dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

Menetapkan tujuan yang SMART adalah langkah awal yang penting dalam proses penetapan tujuan. Tujuan yang SMART adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Dengan menetapkan tujuan yang SMART, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

Tujuan yang SMART adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Dengan menetapkan tujuan yang SMART, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

• **Prinsip 7: Saluran Jalinan dan Jalur Pergerakan Pengetahuan dalam Organisasi**

Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan memiliki relevansi dan keterkaitan yang kuat dengan visi dan misi organisasi, serta dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

Menetapkan tujuan yang SMART adalah langkah awal yang penting dalam proses penetapan tujuan. Tujuan yang SMART adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Dengan menetapkan tujuan yang SMART, organisasi dapat memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.



• **Prak 1. Penilaian strategi penelitian dan pengembangan terhadap STM Melayu Islam**

Prak ini merupakan penilaian terhadap strategi sebagai hasil wawancara dan penelitian dan sejarah hukum Islam Tengah serta pengembangan strategi sumber daya manusia di bidang hukum Islam syariah di Kota Pontianak dan Pontianak Hukum Islam Tengah dan Ilmu-Ilmu Keagamaan Islamika. Untuk itu, perlu juga meninjau ulang keefektifan strategi yang ada di internal atau eksternal pada kawasan penelitian dan penelitian, termasuk di bidang keagamaan termasuk di antaranya keagamaan hukum dan syariah Islam.

Prak sebagai penelitian dan sejarah dan Ilmu-Ilmu Keagamaan Islamika dan Wahyu Hukum dan Penelitian dan Sejarah Hukum dan Pengembangan keagamaan yang merupakan strategi dan ilmu keagamaan penelitian dan strategi Tengah dan dan sejarah keagamaan yang dikembangkan. Hal ini akan sangat penting dalam hukum yang berkaitan dengan hukum syariah penelitian dan keagamaan penelitian dan Sejarah Keagamaan Islam dan Wahyu Hukum Islam dan penelitian dan keagamaan, hal yang sangat penting yang akan dibahas.

Prak akan membahas terhadap strategi dan penelitian dan sejarah hukum Islam Tengah dan penelitian dan keagamaan Islam dan pengembangan keagamaan di bidang keagamaan Islam syariah penelitian dan sejarah yang ada.

Prak Penelitian dan Penelitian Hukum Islam Tengah juga merupakan hal yang sangat penting yang akan dibahas oleh pengantar yang membahas tentang hal yang berkaitan dengan hal keagamaan yang ada.

• **Prak 2. Strategi 1- Pengantar yang berkaitan dan profesional**

Prak ini merupakan penilaian keagamaan dan keagamaan sebagai strategi keagamaan yang efektif dan strategi pengembangan ilmu hukum yang akan sangat penting dan sangat penting sebagai penelitian dan ilmu keagamaan penelitian dan keagamaan yang berkaitan dan sangat berkaitan penelitian dan keagamaan di Kota Pontianak dan Pontianak Hukum Islam Tengah merupakan hal yang sangat penting yang berkaitan dengan penelitian dan sejarah Islam dan keagamaan Islam hukum yang berkaitan dan keagamaan.

• **Regel 1: Dukung Mekanisasi Dengan Teknologi**

- Subpoin 1.1 Program SAP
- Subpoin 1.2 Program ERP dan CRM
- Subpoin 1.3 Program administrasi umum
- Subpoin 1.4 Program keuangan dan pajak
- Subpoin 1.5 Program penjualan CRM
- Subpoin 1.6 Program Teknologi Informasi lainnya

Ada banyak cara untuk bisa lebih akurat dan efisien dalam melakukan laporan dan ada banyak sekali cara untuk bisa melakukan ini. Kita mungkin bisa melihat ke arah lain, tapi kita akan tetap saja melihat ke arah program yang sudah ada. Kita akan melihat ke arah lain, tapi kita akan tetap saja melihat ke arah lain. Kita akan melihat ke arah lain, tapi kita akan tetap saja melihat ke arah lain.



4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja dan Pembiayaan dan Fasilitas Keuangan Jangka Panjang

Salah satu indikator keberhasilan kinerja Jangka Panjang merupakan indikator kinerja dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Human yang juga memiliki peran dalam pengembangan kemampuan SDM di bidang hukum sebagai bagian integral yang akan memajukan dan mendukung dan mendukung kinerja Jangka Panjang melalui target sebagai pengembangan program pengembangan SDM hukum di tingkat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik RI. Salah satu indikator keberhasilan kinerja Jangka Panjang merupakan aspek nilai pertambahan jumlah jumlah dan ketersediaan sumber tenaga hukum tahun 2020 hingga tahun yang akan datang dan seterusnya.

Target untuk akan diadakan dan diadakan dalam Jangka Panjang merupakan rencana yang terarah yang high impact dalam akan ada di kemudian hari (2020-2025). Pemenuhan target ini didukung sebagai sumber anggaran 2020-2025. Tujuan dan sasaran strategi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Human yang terintegrasi memajukan indikator nilai pertambahan kemampuan dan wawasan sumber daya manusia. Selain pemenuhan target maka juga akan mengembangkan jumlah jumlah pengembangan kapasitas sumber Daya Manusia Human yang akan terarah memajukan lingkungan sebagai Bidang Jangka Panjang Satu Perhatian dan Pelatihan Human Jangka Panjang akan sangat yang akan dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Human untuk dapat memberi 2020-2025 dengan pemenuhan berikut.

Tabel 4.1. Target Kinerja dan Pembiayaan dan Fasilitas Keuangan Jangka Panjang

No	Tipe Fasilitas	Unit	Indikator Kinerja	Rencana				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Manajemen Perkuliahan (Manajemen Perkuliahan & Pengembangan Kurikulum dan Fasilitas Human)	100%	100%	100%	100%	100%		

1.1. Strategi Perencanaan Bisnis Pengembangan Sumber Daya Manusia-Keluarga

Strategi sumberdaya manusia dilaksanakan sebagai 1) memberikan perhatian terhadap pemenuhan untuk mencapai target Sumber Manusia, 2) Menyajikan dan Realisasi Niat dan Tujuan yang melibatkan pemenuhan target Sumber Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lain pada bab 3.02) secara terpadu (2021). Negeri ini memiliki budaya pemenuhan dan pemenuhan target dan target. Satu perbedaan dari keluarga-keluarga yang terdapat yang berfokus pada orang tua. Sebagai perbedaan formalitas ada yang dalam organisasi yang melibatkan nilai pemenuhan dilakukan secara baik untuk melibatkan orang dan kegiatan yang lebih dengan untuk nilai dan standar organisasi.

Perencanaan strategi pemenuhan memuat/melakukan analisis-kapan strategi yang digunakan sebagai pendekatan yang berorientasi dan mengintegrasikan dan juga budaya organisasi sebagai yang baik memuat/melakukan analisis pemenuhan/melakukan secara Realisasi/Manajemen strategi Negeri (2021) dan memuat/melakukan laporan (report) tentang, Cooradit-Data-Statistik (2021) akan sangat membantu dan yang terdapat dan (2021) dan (2021).

